

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa saat ini kesatuan wilayah perairan Natuna sedang terancam oleh Tiongkok. Tiongkok mengklaim 90% wilayah Laut China Selatan menggunakan peta yang di ciptakan secara sepihak yaitu Nie-Dashed Line. Peta Nine-Dashed Line tersebut adalah sebuah peta yang membubuhkan 9 garis imajiner yang digunakan Tiongkok untuk mengklaim Laut China Selatan. Tiongkok memasukkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu perairan Natuna kedalam peta tersebut. Zona Ekonomi Eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Karena itu Tiongkok tidak mempunyai hak apapun atas wilayah perairan Natuna

Selain memasukkan Natuna ke dalam peta Nine-Dashed Line, Tiongkok juga mengklaim jika wilayah perairan Natuna adalah wilayah pemancingan tradisional Tiongkok sejak dulu. Hal ini tentu saja sangat dibantah oleh pemerintah Indonesia karena tidak sesuai dengan Hukum laut (UNCLOS) yang telah di sepakati. Karena pernyataan Tiongkok tersebut, banyak kapal-kapal nelayan dengan bendera Tiongkok menerobos masuk ke wilayah Natuna kemudian melakukan pemancingan ilegal yang membuat kedua Negara melayangkan nota protes. Sudah banyak insiden-insiden yang

terjadi di wilayah perairan Natuna sepanjangn 2016 yang membuat hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok tegang. Padahal hubungan antara kedua negara telah dimulai sejak berabad-abad lalu, dan secara resmi diakui pada tahun 1950. Namun hubungan diplomatik dihentikan pada tahun 1967, dan dilanjutkan pada tahun 1990. Era Soekarno menjadi titik penting hubungan persahabatan Indonesia dengan Tiongkok. Hubungan kedua negara terus menunjukkan perkembangan ke arah yang positif, dengan kehadiran Perdana Menteri Tiongkok Zhou En Lai pada Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tanggal 18 April sampai 25 April 1955.

Hubungan Indonesia dan Tiongkok semakin memanas semenjak insiden pada 17 September 2016 lalu, dimana pihak angkatan laut Indonesia melaporkan bahwa ada 12 kapal nelayan Tiongkok yang masuk ke wilayah ZEE Indonesia tersebut. Indonesia telah memberitahukan terhadap Tiongkok agar mengikuti kesepakatan Hukum Laut. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) sendiri merupakan perjanjian hukum laut yang dihasilkan dari konferensi PBB yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Menurut data yang di dapat dari PBB, tercatat ada 166 negara yang telah meratifikasi UNCLOS termasuk Republik Rakyat Tiongkok. Tiongkok meratifikasi UNCLOS pada tanggal 7 Juni 1996. Tiongkok belum pernah sekalipun mengundurkan diri dari UNCLOS terhitung sejak Tiongkok meratifikasi UNCLOS dari tahun 1996 hingga 2014. Meskipun Tiongkok telah meratifikasi Hukum Laut, tetapi Tiongkok justru melanggar perjanjian tersebut karena merasa jika perjanjian tersebut sangat merugikan bagi negaranya. Bukan hanya Indonesia saja tetapi Negara ASEAN lain yang bersengketa di wilayah Laut China Selatan juga mengharapkan Tiongkok untuk menaati perjanjian

hukum laut. Bukan hanya Indonesia saja tetapi Negara ASEAN lain yang bersengketa di wilayah Laut China Selatan juga mengharapkan Tiongkok untuk menaati perjanjian hukum laut tersebut.

Karena insiden tersebut pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya baik upaya militer dan upaya diplomasi untuk bias menjaga kesatuan wilayah perairan Natuna. Indonesia melakukan upaya deterrence dimana mencegah atau mengancam dengan melakukan Show of Force atau menunjukkan kekuatannya. Pemerintah juga telah meningkatkan keamanan wilayah perairan Natuna dengan menambahkan sejumlah pasukan TNI untuk berpatroli di sekitaran wilayah perbatasan. Saat ini pemerintah Indonesia telah melakukan modernisasi alutista untuk TNI AD,AL, dan AU. Presiden juga telah membangun sebuah pangkalan militer di wilayah Natuna agar bias terus berpatroli di sekitaran wilayah perbatasan laut Natuna sehingga tidak ada lagi kapal-kapal asing yang masuk secara illegal. Pada April 2016, *TNI Angkatan Laut menggelar latihan militer gabungan dengan Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) di Batam yang berlokasi sekitar 300 mil dari Natuna. Hal tersebut dilakukan agar memperlihatkan kepada Tiongkok jika Indonesia serius dalam menjaga keutuhan wilayahnya.*

Selain upaya militer, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya-upaya diplomasi agar konflik bias terselesaikan dengan damai. Dimana Indonesia sebagai non-claimant state memiliki peranan yang sangat besar dalam konflik Laut China Selatan. Pemerintah Indonesia juga sangat mendukung pihak-pihak yang

berkepentingan untuk menjadikan wilayah Laut China Selatan sebagai kawasan bebas navigasi. Indonesia juga mendukung segala pencapaian damai melalui DoC dan CoC. Para menteri luar negeri ASEAN pada 22 Juli 1992 mengeluarkan *ASEAN Declaration on the South China Sea*. Deklarasi itu memuat prinsip, antara lain, menekankan perlunya penyelesaian sengketa secara damai dan mendorong kerja sama *safety of maritime navigation and communication*, perlindungan atas lingkungan laut, koordinasi *search and rescue*, dan memerangi pembajakan di laut dan perompakan bersenjata serta perdagangan gelap obat-obatan. Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam deklarasi DoC tersebut. Tetapi perjanjian *Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea* dianggap tidak sepenuhnya berhasil, kemudian ASEAN membuat perjanjian baru yaitu *Code of Conduct (CoC)*.

Peran Indonesia sangat besar untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Hal ini terkait dengan pembentukan Code of Conduct (CoC) yang mengatur tata perilaku di Laut Cina Selatan. Sejak akhir 2011 sampai pertengahan 2012, pejabat-pejabat senior ASEAN bekerja dalam menyusun kerangka sebuah dokumen yang menggambarkan garis-garis besar bagi dokumen CoC. Kode berperilaku itu diharapkan sebagai mekanisme operasional pencegahan konflik dan guna mengatur tata perilaku negara secara efektif. Usaha untuk mewujudkan CoC itu terus dilakukan ASEAN dan direspons positif Tiongkok dengan menggelar Pertemuan Pejabat Tinggi atau *Senior Official Meeting (SOM)* di Tianjin, Tiongkok pada 28-29 Juli 2015.

Selain DoC dan CoC, Indonesia juga melakukan upaya diplomasi pertahanan politik dengan Negara AS dan Tiongkok. Dalam ranah politik pertahanan, Indonesia menjadi negara yang sangat penting di kawasan Asia Pasifik. Sejak lama para ahli strategi menilai bahwa Indonesia demikian penting dalam penilaian geostrategi kawasan. . Seperti yang diketahui bahwa AS juga memiliki kepentingan terhadap Konflik Laut China Selatan. Indonesia dan China telah menjalin kerja sama pertahanan sejak pembentukan Forum Konsultasi Bilateral Bidang Pertahanan pada tahun 2007 sebagai bagian dari Deklarasi Kemitraan Strategis yang disepakati kedua negara pada 25 April 2005. Kedua negara sepakat menjalin kemitraan strategis komprehensif pada Oktober 2013. Dalam konteks keamanan, kehadiran Tiongkok membuat negara di luar kawasan seperti AS untuk berperan lebih besar sebagai penyeimbang. Indonesia telah melakukan diplomasi pertahanan politik dengan Tiongkok dan juga AS dimana Menteri Pertahanan RI menemui Menteri pertahanan AS pada bulan Mei 2015 dan *Wakil Ketua Komisi Militer Sentral Tiongkok*, ketika berkunjung ke RRT pada Oktober 2015.

Dalam pertemuan di Pentagon, Washington, DC, pada 12 Mei 2015 pemerintah AS dan Indonesia sepakat meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dikaitkan dengan ancaman nyata yang terus berkembang. Presiden Indonesia kemudian berkunjung ke AS atas undangan Presiden AS Barack Obama, pertemuan keduanya mempunyai arti penting selain dalam konteks ekonomi dan beberapa bidang lainnya juga dalam bidang politik dan pertahanan.

